

RENCANA KERJA TAHUN 2023



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

KABUPATEN PASAMAN BARAT



Planning for Better Future



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan Perangkat Daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

(1) Sistematika Renja PD Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- (2) Renja PD Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Tenaga Kerja;
- g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Ketahanan Pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- u. Dinas Perkebunan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Inspektorat;
- y. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- z. Badan Aset dan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- ee. Rumah Sakit Umum Daerah;
- ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- gg. Kecamatan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 3 Agustus 2022



Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 3 Agustus 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 46



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/24 /BUP-PASBAR/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023**

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diawali dengan persiapan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Ketua**
1. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
 2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.
- B. Sekretaris**
1. Mengoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
 2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;

3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

C. Kelompok Kerja

1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023;
2. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
5. Menganalisa dan mengevaluasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
6. Menganalisa dan mengevaluasi implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Menganalisa dan mengevaluasi kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pencapaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan lima tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis) dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
9. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat 2023;
10. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Kerja;
11. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan

12. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 kepada pimpinan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 18 Januari 2022



Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat

Nomor : 188.45/24 /BUP-PASBAR/2022
 Tanggal : 18 Januari 2022
 Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023**

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Harlina Syahputri, SH, MM	Kepala	Ketua
Dr. Ikhwanri, M.Pd	Sekretaris	Sekretaris
Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		
Yusva Yetti, SH, MM	Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Koordinator
Ombun Rahmi, S.Si, M.Si	Kasubid Pendanaan Pembangunan	Anggota
Alhadi, S.STP	Kasubid Perencanaan dan Pembangunan	Anggota
Renita, S. Hut	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Anggota
Armellia Prima Yuna, S.Hut	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan		
Zulkarnaidi, SH	Kabid Penelitian dan Pengembangan	Koordinator
Delniriawati, SE	Kasubid Inovasi dan Teknologi	Anggota
Yonerita, ST, MM	Kasubid Penelitian dan Pengembangan	Anggota
Jovi Ramanda, SE	Perencana Ahli Pertama	Anggota
Supria Widodo, S.AP	Analisis Program Pembangunan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Sosial dan Budaya		
Sasmita Siregar, S.Si, M.Eng	Kabid Sosial dan Budaya	Koordinator
Astra, S.IP, ME	Kasubid Sosial Kemasyarakatan	Anggota
Rafki Junaidi, SKM	Kasubid Pengembangan SDM	Anggota
Andhika Manggala, S.STP	Kasubid Pemerintahan	Anggota
Lili Syariyenti, SKM	Analisis Perencanaan Aparatur	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah		
Surahdi, S.Si	Kabid Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	Koordinator
Yunilasari Dedni, ST	Kasubid SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Anggota
Hermanto, SP	Kasubid Ekonomi	Anggota
Nurlaili, ST	Kasubid Infrastruktur Prasarana Wilayah dan Kawasan Pemukiman	Anggota
Atika Sandra Junaidi, ST	Analisis Tata Ruang	Anggota



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu.

Bappeda Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu unit eselon II berkewajiban menyusun Renja dalam rangka mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Penyusunan Renja merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023.

Renja disusun sesuai tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis OPD, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan pagu indikatif yang ditetapkan. Dengan melaksanakan pelaporan, pengukuran, dan evaluasi pencapaian kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak mengenai kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat. Kami mengharapkan adanya masukan-masukan dari semua pihak untuk memperbaiki kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat dimasa mendatang.

Simpang Empat, 3 Agustus 2022

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM
NIP. 19780618 200212 2 005

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai badan koordinasi teknis di bidang perencanaan pembangunan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam merancang dokumen perencanaan. Berkualitasnya dokumen perencanaan berpengaruh pada kualitas dan hasil pembangunan itu sendiri. Bappeda perlu menyusun program/kegiatan periode satu tahunan untuk menunjang tujuan pembangunan tersebut melalui penyusunan dokumen yang tersusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Rencana Kerja (RENJA) mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani perencanaan pada BAPPEDA dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Perangkat Daerah (PD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja Bappeda berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja juga merupakan bentuk jaminan terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan dan menjadi salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja.

Renja BAPPEDA Tahun 2023 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dan tahun berjalan (2022), program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2022. BAPPEDA sebagai OPD yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang perencanaan pembangunan daerah, mempunyai tugas strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, dan penelitian dan pengembangan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah. BAPPEDA dalam menjalankan tugas tersebut berupaya mewujudkan sistem pembangunan daerah yang berkualitas dengan cara meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang didukung oleh hasil kelitbangan dan inovasi daerah, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, antar perencanaan jangka panjang, menengah, tahunan dan antar nasional dan/antar daerah.

Renja Bappeda selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD. RKA Bappeda tersebut menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023. Oleh sebab itu, kualitas Renja sangat menentukan kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, Renja juga menjadi salah satu dokumen yang mendeskripsikan kemampuan Bappeda dalam melihat permasalahan kemudian disusun, dikelompokkan, diorganisasikan, diimplementasikan, dikendalikan serta dievaluasi setiap capaian *output* dan *outcome* pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Renja BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 17. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja BAPPEDA serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang terintegrasi pada Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selama periode satu tahun;
2. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, maupun penelitian dan pengembangan;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan;
4. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi serta tolok ukur kinerja BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat;
5. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja BAPPEDA mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat ketentuan antara lain:

- 1) Memuat program, kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA;
- 2) Berpedoman pada Renstra BAPPEDA dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja;
- 3) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun pada rancangan awal Renja adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra;
- 4) Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD serta disusun selaras dengan

program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;

- 5) Renja disajikan paling sedikit memuat pendahuluan; hasil evaluasi Renja tahun lalu; tujuan dan sasaran; rencana kerja dan pendanaan; dan penutup.
- 6) Dokumen Renja akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan menjadi rancangan RKPD Pemerintah Daerah.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPPEDA, pengertian ringkas tentang Renja BAPPEDA, proses penyusunan Renja BAPPEDA, keterkaitan antara Renja BAPPEDA dengan dokumen RKPD, Renstra BAPPEDA, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan BAPPEDA, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BAPPEDA.
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BAPPEDA.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BAPPEDA, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2023

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun Lalu dan Capaian Renstra BAPPEDA*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun sebelumnya, capaian Renstra BAPPEDA berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BAPPEDA berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan BAPPEDA dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BAPPEDA, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BAPPEDA dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja BAPPEDA*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BAPPEDA.
- 3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi BAPPEDA dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun Lalu dan Capaian Renstra BAPPEDA

Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda dinilai dengan membandingkan realisasi capaian program pembangunan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappeda. Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja. Evaluasi capaian target kinerja juga menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan. Selain itu, Evaluasi pelaksanaan Renstra Bappeda memberi gambaran tentang realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan atau realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga, dapat ditelaah faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya kondisi melebihi target kinerja program/kegiatan, agar selanjutnya dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada tahun 2021, BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 4 program yang terdiri dari 15 kegiatan dan 40 sub kegiatan, sementara pada tahun 2022 BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 4 program, 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019). Evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun 2021 memuat pencapaian target kinerja tahun 2021 berdasarkan rencana kerja tahun 2021. Sementara, evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun 2022 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BAPPEDA pada tahun sebelumnya serta yang akan datang. Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja Bappeda pada tahun 2021 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (T.A 2022) disajikan pada Tabel 2.1.1 (T-C.29) dan tabel 2.1.2 di bawah ini:

Tabel 2.1.1. (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2021
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat

Kode	PMDN 13		PEMUTAKHIRAN		Target Kinerja Capaian Renstra Pada Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja dan Anggaran sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022																										
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)					Target Renja Tahun 2021		Realisasi Renja Tahun 2021		Tingkat Realisasi Tahun 2021 (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)																								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
1				2				3				4				5				6				7				8= (7/6)				9				10= (5+7+9)				11=10/9			
								9.175.526.550		100%		2.014.449.469		100%	5.426.760.490	90,12%	5.022.882.713	90%	93%			5.233.170.533			5.233.170.533			100%		5.048.170.483	100%	100%			100%								
5	01			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			8.728.426.960	100%	933.911.164	100%	5.354.280.770	97,46%	4.957.605.885	97,46%	93%	100%	5.048.170.483	100%			5.048.170.483	100%		5.048.170.483	100%		5.048.170.483	100%	100%			100%			100%							
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	8.008.426.960	-	-	100%	4.510.576.851	75%	4.296.696.859	75,00%	95%	100%	4.392.593.762	100%			4.392.593.762	100%		4.392.593.762	100%		4.392.593.762	100%	100%			100%			100%						
4	03	01	01	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran				80%	604.424.002																																	
5	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP BAPPEDA	9 dok	35.116.200	-	-	8 dok	23.386.500	8 dok	18.511.261	100%	100%	8 dok	50.872.000	8 dok			50.872.000	100,00%		50.872.000	100,00%		50.872.000	100,00%	100%			100%			100%						
5	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan BAPPEDA yang disusun	7 dok	18.228.000	-	-	6 dok	13.819.000	6 dok	10.307.250	100%	75%	6 dok	28.996.000	6 dok			28.996.000	100%		28.996.000	100%		28.996.000	100%	100%			100%			100%						
5	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja (pelaporan) BAPPEDA yang disusun	2 dok	16.888.200	-	-	2 dok	9.567.500	2 dok	8.204.011	100%	86%	2 dok	21.876.000	2 dok			21.876.000	100%		21.876.000	100%		21.876.000	100%	100%			100%			100%						
5	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan BAPPEDA	100%	3.706.954.535	-	-	100%	3.812.616.536	100%	3.674.246.789	100%	100%	100%	3.520.762.662	100%			3.520.762.662	100%		3.520.762.662	100%		3.520.762.662	100%	100%			100%			100%						
5	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	33 orang	3.500.849.535	-	-	33 orang	3.606.511.536	32 orang	3.472.395.289	97%	96%	31 orang	3.294.172.662	31 orang			3.294.172.662	100%		3.294.172.662	100%		3.294.172.662	100%	100%			100%			100%						
5	01	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 bulan	139.655.000	-	-	12 bulan	139.655.000	12 bulan	135.403.500	100%	97%	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	01	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Frekuensi penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 bulan	66.450.000	-	-	12 bulan	66.450.000	12 bulan	66.450.000	100%	100%	12 bulan	226.590.000	12 bulan			226.590.000	100%		226.590.000	100%		226.590.000	100%	100%			100%			100%						
5	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP BAPPEDA	589 unit	57.592.500	-	-	589 unit	54.850.000	589 unit	50.172.000	100%	91%	589 unit	48.850.000	589 unit			48.850.000	100%		48.850.000	100%		48.850.000	100%	100%			100%			100%						
5	01	01	2.03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada BAPPEDA	2 orang	30.870.000	-	-	2 orang	29.400.000	2 orang	28.972.000	100%	99%	2 orang	29.400.000	2 orang			29.400.000	100%		29.400.000	100%		29.400.000	100%	100%			100%			100%						
5	01	01	2.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah PNS dan THL petugas Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)	2 orang	26.722.500	-	-	2 orang	25.450.000	3 orang	21.200.000	100%	83%	2 orang	19.450.000	2 orang			19.450.000	100%		19.450.000	100%		19.450.000	100%	100%			100%			100%						
5	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP BAPPEDA	100%	3.538.178.850	-	-	100%	61.237.365	100%	55.884.042	100%	91%	100%	67.088.810	100%			67.088.810	100%		67.088.810	100%		67.088.810	100%	100%			100%			100%						
5	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	1 Paket	4.002.075	-	-	1 paket	4.911.500	1 paket	4.795.000	100%	98%	1 paket	7.022.610	1 paket			7.022.610	100%		7.022.610	100%		7.022.610	100%	100%			100%			100%						
5	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket	30.000.000	-	-	1 paket	29.072.080	1 paket	28.852.600	100%	99%	1 paket	30.000.000	1 paket			30.000.000	100%		30.000.000	100%		30.000.000	100%	100%			100%			100%						
5	01	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 Paket	7.379.655	-	-	1 paket	9.026.785	1 paket	7.621.192	100%	84%	1 paket	8.079.200	1 paket			8.079.200	100%		8.079.200	100%		8.079.200	100%	100%			100%			100%						
5	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Bappeda yang dibutuhkan	1 Paket	22.692.100	-	-	1 paket	18.227.000	1 paket	14.615.250	100%	80%	1 paket	21.987.000	1 paket			21.987.000	100%		21.987.000	100%		21.987.000	100%	100%			100%			100%						
5	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP BAPPEDA	100%	135.550.000	-	-	100%	123.662.500	100%	92.773.417	100%	75%	100%	158.053.750	100%			158.053.750	100%		158.053.750	100%		158.053.750	100%	100%			100%			100%						

Kode	PMDN 13		PEMUTAKHIRAN		Target Kinerja Capaian Renstra Pada Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja dan Anggaran sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022																																					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)					Target Renja Tahun 2021		Realisasi Renja Tahun 2021		Tingkat Realisasi Tahun 2021 (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)																																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																				
1					2					3					4					5					6					7					8= (7/6)					9					10= (5+7+9)					11=10/9				
5	01	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 bulan	107.100.000	-	-	12 bulan	102.012.500	12 bulan	72.823.417	100%	71%	12 bulan	120.103.750	12 bulan	120.103.750	100%	100%																														
5	01	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Frekuensi penyediaan jasa pembersihan landscape kantor 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	1. 12 kali 2. 2 orang	28.450.000	-	-	1. 12 kali 2. 2 orang	21.650.000	2 orang	19.950.000	1. 100% 2. 100%	92%	1. 12 kali 2. 2 orang	37.950.000	1. 12 kali 2. 2 orang	37.950.000	100%	100%																														
4	03	01	02		Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara					45 Unit/Paket	158.257.850																																										
5	01	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP BAPPEDA	57 unit	197.398.375	-	-	100%	228.158.750	100%	205.786.750	100%	90%	57 unit	208.316.250	57 unit	208.316.250	100,00%	100%																														
5	01	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	1. 23 unit 2. 3 orang	147.673.375	-	-	1. 23 unit 2. 5 orang	190.541.250	1. 23 unit 2. 4 orang	177.783.950	1. 100% 2. 100%	93%	1. 23 unit 2. 3 orang	168.591.250	1. 23 unit 2. 3 orang	168.591.250	100%	100%																														
5	01	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	34 unit	39.725.000	-	-	34 unit	37.617.500	34 orang	28.002.800	100%	74%	34 unit	39.725.000	34 unit	39.725.000	100%	100%																														
5	01	01	2.09	09			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																															
4	03	01	03		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti					50%	171.229.312																																										
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP BAPPEDA	12 kali	200.000.000	-	-	12 kali	179.165.000	12 kali	171.820.600	100%	96%	12 kali	200.000.000	12 kali	200.000.000	100%	100%																														
5	01	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti dan penyediaan makan/ minum rapat koordinasi internal BAPPEDA	12 kali	200.000.000	-	-	12 kali	179.165.000	12 kali	171.820.600	100%	96%	12 kali	200.000.000	12 kali	200.000.000	100%	100%																														
4	03	02			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase terpenuhinya sarana an prasarana aparatur					96%	43.106.420																																										
5	01	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	25.000.000	-	-	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	100%	100%	53.277.290	100%	53.277.290	100%	100%																														
4	03	02	02		Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin	Jumlah Pengadaan peralatan/kendaraan dan mesin					17 Unit	43.106.420																																										
5	01	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP BAPPEDA	2 unit	25.000.000	-	-	2 unit	27.500.000	1 unit	27.500.000	50%	100%	2 unit	53.277.290	2 unit	53.277.290	100%	100%																														
5	01	01	2.07	01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	1 unit	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																															
5	01	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	1 unit	7.000.000	-	-	1 unit	27.500.000	1 unit	27.500.000	100%	100%	2 unit	53.277.290	2 unit	53.277.290	100%	100%																														
5	01	01	2.07	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang dibangun/ rehab	-	-	-	-	1 unit	-	0 unit	-	-	-	-	-	-	-	-																															

Kode	PMDN 13				PEMUTAKHIRAN		Target Kinerja Capaian Renstra Pada Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja dan Anggaran sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022																								
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (output)		Target Renja Tahun 2021		Realisasi Renja Tahun 2021				Tingkat Realisasi Tahun 2021 (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)																				
							K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
1				2				3				4				5				6				7				8= (7/6)				9				10= (5+7+9)				11=10/9			
4	03	15	14	Sistem Inovasi Daerah		1. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) 2. Fasilitas Labor Inovasi dengan LAN				3 Kali		1.595.000																															
5	05	02	2.04					Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Kategori capaian Innovation Government Award (IGA)		100%		150.000.000		-		-		48 inovasi		72.479.720		1 app		65.276.828		100%		90%		50 inovasi		110.000.050		50 inovasi		110.000.050		100%		100%	
5	05	02	2.04	03			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		Jumlah Inovasi OPD		52 inovasi		150.000.000		-		-		45 inovasi		72.479.720		25 inovasi		65.276.828		56%		90%		50 inovasi		110.000.050		50 inovasi		110.000.050		100%		100%		
4	03	20		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Jumlah OPD dengan dokumen perencanaan sesuai regulasi						100%		5.500.000																													
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%		50.000.000												100%		203.065.850		100%		203.065.850		100%		100%							
4	03	20	2.05	Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah aparat perencana yang mengikuti Bimtek						43 Orang/ OPD		5.500.000																													
5	01	01	2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Level Maturitas SPIP BAPPEDA		55 orang		50.000.000		-		-		-		-		-		-		-		55 orang		203.065.850		55 orang		203.065.850		100%		100%			
5	01	01	2.05	10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		55 orang		50.000.000		-		-		-		-		-		-		-		55 orang		203.065.850		55 orang		203.065.850		100%		100%				
				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik						100%		260.952.950																													
5	01	02						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		-		370.000.000		-		-		100%		502.709.069		100%		384.364.100		-		-		8 dok		352.089.771		8 dok		352.089.771		100,00%		100%	
4	03	21	01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik		Jumlah dokumen hasil musrenbang						1 Dok		38.074.500																													
5	01	02	2.01					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP		3 dok		67.000.000		-		-		3 dok		53.800.000		3 dok		31.556.450		100%		59%		3 dok		60.000.000		3 dok		60.000.000		100%		100%	
5	01	02	2.01	04			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah dokumen hasil Forum Perangkat Daerah		1 dok		5.000.000		-		-		1 dok		5.000.000		1 dok		4.186.000		100%		84%		1 dok		5.000.000		1 dok		5.000.000		100%		100%		
5	01	02	2.01	05			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kabupaten		1 dok		37.000.000		-		-		1 dok		30.000.000		1 dok		11.961.650		100%		40%		1 dok		35.000.000		1 dok		35.000.000		100%		100%		
5	01	02	2.01	06			Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kecamatan		1 dok		25.000.000		-		-		1 dok		18.800.000		1 dok		15.408.800		100%		82%		1 dok		20.000.000		1 dok		20.000.000		100%		100%		
4	03	21	08	Penyusunan Rancangan RKPD		Jumlah dokumen RKPD						2 Dok		53.780.750																													
5	01	02	2.01					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP		6 dok		253.000.000		-		-		6 dok		448.909.069		6 dok		352.807.650		100%		79%		5 dok		292.089.771		5 dok		292.089.771		100%		100%	

Kode	PMDN 13				PEMUTAKHIRAN		Target Kinerja Capaian Renstra Pada Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja dan Anggaran sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022																																			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)		Target Renja Tahun 2021		Realisasi Renja Tahun 2021				Tingkat Realisasi Tahun 2021 (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)																															
							K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
1					2					3					4					5					6					7					8= (7/6)					9					10= (5+7+9)					11=10/9				
5	01	02	2.01	01				Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen usulan kegiatan yang didanai melalui DAK, APBN, APBD Provinsi	3 dok	50.000.000	-	-	3 dok	61.000.000	3 dok	47.255.500	100%	77%	3 dok	65.000.000	3 dok	65.000.000	100%	100%																													
5	01	02	2.01	07				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD tahun 2022 beserta Perubahan Tahun 2021	3 dok	203.000.000	-	-	3 dok	387.909.069	3 dok	305.552.150	100%	79%	2 dok	227.089.771	2 dok	227.089.771	100%	100%																													
4	03	21	23		Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2021-2026	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2021-2026						1 Dok	169.097.700																																									
5	01	02	2.02				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP	100%	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
5	01	02	2.02	01			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data perencanaan pembangunan daerah yang dianalisis untuk dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan daerah	35 Data	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
5	01	02	2.02	03			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah profil pembangunan daerah yang disusun	1 Profil	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
4	03	23	03		PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	1. Persentase pencapaian target kinerja Sasaran Misi I RPJMD 2. Persentase pencapaian target kinerja Sasaran Misi II RPJMD 3. Persentase pencapaian target kinerja Sasaran Misi IV RPJMD 4. Persentase pencapaian target kinerja Sasaran Misi V RPJMD						100%	219.054.340																																									
5	01	03					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	100%	350.000.000	-	-	100%	340.995.050	100%	276.544.926	100%	81%	80%	303.486.950	100%	303.486.950	125%	100%																														
4	03	23	03		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Kesesuaian program pembangunan bidang sosial budaya dengan dokumen perencanaan						95%	85.307.140																																									
5	01	03	2.01				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100%	125.000.000	-	-	100%	58.298.000	100%	49.853.850	100%	86%	100%	79.999.500	100%	79.999.500	100%	100%																														
5	01	03	2.01	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen evaluasi pencapaian SDGs (semester dan tahunan)	2 dok	50.000.000	-	-	100%	58.298.000	95%	49.853.850	95%	86%	2 dok	29.999.500	2 dok	29.999.500	100%	100%																														
5	01	03	2.01	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD Lingkup Bidang Sosial Budaya yang menyusun perencanaan dengan baik	100%	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	100%																														

Kode					PMDN 13		PEMUTAKHIRAN		Target Kinerja Capalan Renstra Pada Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja dan Anggaran sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)					Target Renja Tahun 2021		Realisasi Renja Tahun 2021		Tingkat Realisasi Tahun 2021 (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					2		3		4		5		6		7		8= (7/6)		9		10= (5+7+9)		11=10/9	
4	03	23	05		Koordinasi TKPK Kabu. Pasaman Baarat	1. Frekuensi Monev RLRT yang difasilitasi 2. Frekuensi Pelaksanaan Evaluasi Jorong Tertinggal 3. Frekuensi Rakor TKPD yang difasilitasi 4. Jumlah Dokumen LP2KD yang disusun 5. Jumlah Profil Keteringgalan yang disusun 6. Jumlah Dokumen SKPD 7. Jumlah dokumen Analisa Belanja Publik untuk Penanggulangan Kemiskinan					1 Dok	22.054.700												
5	01	03	2.01				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100%	75.000.000			30.065.950		17.747.550		59%	100%	73.494.450	100%	73.494.450	100%	100%	
5	01	03	2.01	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1. Evaluasi Daerah Tertinggal 2. Evaluasi Monev SLRT yang difasilitasi 3. Jumlah dokumen LS2KD yang disusun 4. Rakor TKPKD 5. Perbup PKD	1. 1 dok 2. 2 kali 3. 1 dok 4. 3 kali 5. 1 dok	75.000.000	-	-	1. 2 kali 2. 1 kali 3. 3 kali 4. 1 buku 5. 1 buku	30.065.950	1. 0 kali 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 0 buku 5. 1 buku	17.747.550	1. 0% 2. 100% 3. 33,33% 4. 0% 5. 100%	59%	1. 1 dok 2. 2 kali 3. 1 dok 4. 1 dok 5. 3 kali	73.494.450	1. 1 dok 2. 2 kali 3. 1 dok 4. 1 dok 5. 3 kali	73.494.450	100%	100%
4	03	01	23	09	Fasilitasi PUG	1. Jumlah Dokumen RAD PUG 2. Jumlah Dokumen GBS (Gender Budget Statement) OPD 3. Pelaporan RANDA PUG					1. 1 Dok 2. 4 Laporan RANDA-PUG 3. 15 Dok GBS	400.000												
5	01	03	2.01				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		150.000.000			122.408.650		101.806.688		83%	100%	124.996.050	100%	124.996.050	100%	100%	
5	01	03	2.01	05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Data Manajmen Stunting (Aksi 5) 2. Dokumen Analisa Situasi (Aksi 1) 3. Dokumen RAD PUG 4. Dokumen Rencana Kerja 5. Pengelolaan Aplikasi Sister 6. Terlaksananya Rembuk Stunting	-	-	-	-	1. 1 dok 2. 1 dok 3. 1 dok 4. 1 dok 5. 1 App 6. 1 kali	85.039.850	1. 1 dok 2. 1 dok 3. 1 dok 4. 1 dok 5. 1 App 6. 1 kali	72.939.750	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100% 6. 100%	86%	-	-	-	-	-	
5	01	03	2.01	07			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1. Dokumen Review Kinerja 2. Pelaporan 8 aksi konvergensi secara lengkap 3. Pelaporan aksi PUG 4. Terlaksananya Monev PUG 5. Dokumen RANDA PUG 6. pelaporan RANDA PUG CP 03,05,09,12 tepat waktu 7. Capaian indikator PUG (hijau) untuk seluruh kategori	1. - 2. - 3. - 4. - 5. 1 dok 6. 4 kali 7. 100%	50.000.000	-	-	1. 1 dok 2. 100% 3. 4 kali 4. 4 kali	37.368.800	1. 1 dok 2. 100% 3. 4 kali 4. 4 kali	28.866.938	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%	77%	1. - 2. - 3. - 4. - 5. 1 dok 6. 4 kali 7. 100%	24.996.950	1. 1 dok 2. 4 kali	24.996.950	100%	100%
5	01	03	2.01	08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1. FGD dan fasilitasi Aksi Konvergensi Nagari 2. Terlaksananya 8 Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting tepat waktu	1. 38 kali 2. 8 Aksi	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1. 38 kali 2. 8 Aksi	99.999.100	1. 38 kali 2. 8 Aksi	99.999.100	100%	100%	

[illegible]

Kode	PMDN 13				PEMUTAKHIRAN		Target Kinerja Capaian Renstra Pada Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja dan Anggaran sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022									
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)kegiatan (output)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)kegiatan (output)	Target Renja Tahun 2021						Realisasi Renja Tahun 2021		Tingkat Realisasi Tahun 2021 (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022				Tingkat capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1				2				3				4		5		6		7		8= (7/6)		9		10= (5+7+9)		11=10/9		
5	01	03						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	100%	40.000.000	-	-	100%	26.378.650	100%	23.005.050	100%	100%	100%	131.050.000	100%	131.050.000	100%	100%			
4	03	22	04		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase kesesuaian program pembangunan bidang ekonomi dengan dokumen perencanaan daerah				-	-																	
5	01	03	2.02					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100%	40.000.000	-	-	100%	26.378.650	100%	23.005.050	100%	87%	100%	131.050.000	100%	131.050.000	100%	100%			
5	01	03	2.02	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Jumlah rapat dan pelaksanaan koordinasi 2. Jumlah regulasi dan laporan yang diterbitkan	1. 4 kali 2. 1 SK	40.000.000	-	-	3 kali	26.378.650	3 kali	23.005.050	100%	87%	1. 4 kali 2. 1 laporan	131.050.000	1. 4 kali 2. 1 laporan	131.050.000	100%	100%			
4	03	22	19		Fasilitasi TKPKP (Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan)	Jumlah dokumen/laporan pelaksanaan kegiatan PKP				0 Dok	-																	
4	03	24			PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase pencapaian target kinerja Sasaran Misi VI RPJMD				100%	247.839.045																	
5	01	03						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	-	-	-	-	100%	419.823.773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	03	24	11		Fasilitasi Kegiatan IPDMIP (Integrated Participatory Development and Managemen of Irrigation Project)	Jumlah Dokumen/laporan pelaksanaan monitoring program irigasi pada kegiatan IPDMIP				19 Dok/ Laporan PSETK	247.839.045																	
5	01	03	2.02					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	100%	419.823.773	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	01	03	2.02	05				Fasilitasi kegiatan IPDMID (Intagrated Participatory Development and Management of Irrigation Project)	1. Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang dilakukan penelusuran jaringan 2. Jumlahpelaksanaan rapat monitor 3. jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (sosialisasi PPSI, Rapat Komir, FGD) 4. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (workshop dan rapat komir) 5. Jumlah pelaksanaan rapat monitoring	-	-	-	-	1. 40 Daerah Irigasi (DI) 2. 3 kali 3. 10 kali	419.823.773	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	03	24			PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase pencapaian target kinerja Sasaran Misi VI RPJMD				100%	146.058.750																	
5	01	03						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	100%	310.000.000	-	-	-	541.213.773	-	350.525.175	-	-	80%	408.065.955	100%	408.065.955	125%	100%			

Kode	PMDN 13		PEMUTAKHIRAN		Target Kinerja Capalan Renstra Pada Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja dan Anggaran sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)					Target Renja Tahun 2021		Realisasi Renja Tahun 2021		Tingkat Realisasi Tahun 2021 (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1				2				3				4				5				6				7				8= (7/6)				9				10= (5+7+9)				11=10/9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4	03	24	10	Koordinasi Perencanaan Pembangunanana Bidang PWSDA	Persentase kesesual program pembangunana bidang PWSDA dengan Dokumen Perencanaan Daerah			100%	78.392.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Kode	PMDN 13		PEMUTAKHIRAN		Target Kinerja Capaian Renstra Pada Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja dan Anggaran sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)					Target Renja Tahun 2021		Realisasi Renja Tahun 2021		Tingkat Realisasi Tahun 2021 (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1				2				3				4				5				6				7				8= (7/6)				9				10= (5+7+9)				11=10/9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4	03	26	01	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi/laporan hasil monitoring APBN/DAK			4 Laporan	2.819.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Faktor Pendukung

- Anggaran untuk pelaksanaan aktifitas dalam sub kegiatan tersedia dengan jumlah memadai
- Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana awal
- Sebagian besar tahapan perencanaan pembangunan telah berjalan sesuai dengan kalender perencanaan dan Rencana operasional kegiatan.

Faktor Penghambat

- Akibat terjadinya Pandemi Covid-19 menyulitkan untuk melakukan aktifitas dengan melibatkan peserta dalam jumlah banyak, sehingga realisasi anggaran tidak terserap sesuai rencana awal
- Terbatasnya kapasitas SDM dalam pelaksanaan Monev dan sistem Monev yang dilakukan masih bersifat manual belum berbasis sistem teknologi informasi

Simpang Emu, Agustus 2022

Harina Syahputri, SH, MM
NIP. 19780618 200212 2 005

Catatan :

- Kode Program, kegiatan, Sub Kegiatan
- Program dan Kegiatan serta Indikator sesuai dengan PMDN 13
- Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator sesuai dengan PMDN Pemutakhiran
- Target Renstra Kinerja dan Keuangan Tahun 2022
- Realisasi Kinerja dan Keuangan s/d Tahun 2019
- Target Kinerja dan Keuangan Renja Tahun 2020
- Realisasi Kinerja dan Keuangan Renja Tahun 2020
- Tingkat capaian Kinerja dan keuangan Tahun 2020 (perbandingan realisasi tahun 2020 dengan Target 2020)
- Target Kinerja dan Keuangan Renja Tahun 2021
- Realisasi capaian Kinerja dan Keuangan (jumlah Kolom 5,7 dan 9)
- Perbandingan antara realisasi capaian Kinerja dan Keuangan sampai dengan Tahun 2021 dengan target 2021

Pada tahun 2021, Bappeda Kabupaten Pasaman Barat mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp 5.888.579.433,00 (**lima milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah**). Alokasi tahun 2021 digunakan untuk mendukung tujuan dan sasaran Bappeda mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas. Penggunaan anggaran Bappeda pada tahun 2021 diuraikan ke dalam 4 (empat) program yang terdiri dari 15 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Berdasarkan tabel T-C.29, *progress* dan realisasi program dan kegiatan tahun 2021 sebesar Rp 5.306.665.000,00 (**lima milyar tiga ratus enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah**) atau terealisasi sebesar 90,12%. Sementara masih terdapat anggaran sebesar Rp 581.914.433,00 (**lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah**) atau tidak terealisasi sebesar 9,88 %. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan pada tahun 2021 dilakukan *refocusing* anggaran untuk mendukung penanganan Covid-19.

Anggaran Bappeda 2021 terdiri dari 4 (empat) program. Keempat program tersebut dibagi ke dalam dua jenis, yaitu program yang mendukung pelaksanaan kegiatan harian atau yang bersifat rutin dan program yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi teknis Bappeda. Adapun program yang bersifat rutin adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Pengembangan Data/Informasi sebesar Rp 4.296.696.859,00 (**empat milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah**). Rata-rata realisasi anggarannya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota terserap sebesar 95% atau hanya menyisakan sebesar 5% dari anggaran yang tidak dapat direalisasikan. Sementara untuk kegiatan teknis, yaitu Program Perencanaan Pembangunan yang mencakup kegiatan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Prasarana Wilayah dan SDA dan Program Pengembangan dan Penelitian Daerah dialokasikan pagu sebesar Rp 1.009.968.141,00 (**satu milyar sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah**). Rata-rata realisasi anggaran Bappeda yang bersifat teknis untuk tahun 2021 sebesar 73%. Berikut rincian realisasi anggaran dari 4 program dan 15 kegiatan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 23.386.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 18.511.261,00 atau sebesar 100%.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 3.812.616.536,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 3.674.248.789,00 atau sebesar 100%.
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 54.850.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 50.172.000,00 atau sebesar 91%.
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Tidak direalisasikan dikarenakan dirasionalisasi untuk penanganan dampak Covid-19.

- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 61.237.365,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 55.884.042,00 atau sebesar 91%.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 27.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 27.500.000,00 atau sebesar 100%
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 123.662.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 92.773.417,00 atau sebesar 75%.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 228.158.750,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 205.786.750,00 atau sebesar 90%.
2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program ini dilaksanakan untuk menjawab tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Pasaman Barat. Adapun keluaran dari kegiatan ini berupa dokumen perencanaan demi mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 519.344.269,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 396.422.850,00 atau setara 69%.
 - 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp 384.364.100,00 atau sebesar 76% dari target anggaran sebesar Rp 502.709.069,00
 - 2) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 16.635.200,00 dan terealisasi sebesar Rp 12.058.750,00 atau sebesar 72%.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini bertujuan menjaga kesesuaian pencapaian sasaran perencanaan lima tahunan dengan tahunan, konsistensi perencanaan pembangunan ekonomi dengan rencana tata ruang Kabupaten Pasaman Barat, keterpaduan program/kegiatan pembangunan Bidang Sosial Budaya Kabupaten Pasaman Barat, menjaga kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan bidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 786.178.823,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 548.268.463,00 atau setara 69%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 58.298.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 49.853.850,00 atau setara 85%.
 - 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 26.378.650,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 23.005.050,00 atau setara 87%.
 - 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 121.390.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 104.732.584,00 atau setara 86%.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- 1) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena ada kebijakan *refocusing* anggaran tahun 2021 sehingga target output kegiatan ini tidak tercapai.

- 2) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 72.479.720,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 65.276.828,00 atau setara 90%.

Secara umum, rata-rata capaian program/kegiatan dapat terealisasi dengan baik dengan realisasi capaian fisik 100%, kecuali kegiatan yang anggarannya digunakan untuk *refocusing* penanganan Covid-19. Program/kegiatan dapat terealisasi dengan baik dikarenakan anggaran tersedia dan sumber daya yang tersedia dapat dioptimalkan dengan baik, selain itu, kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin organisasi. Penyerapan anggaran tidak mencapai target 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Pasaman Barat. Penyerapan tidak mencapai 100% pada kegiatan teknis disebabkan oleh adanya kebijakan pencegahan Covid-19 yang membatasi pelaksanaan kegiatan dengan mengumpulkan massa dengan jumlah banyak. Tidak ada faktor penghambat lain yang menjadi penghalang pencapaian output program/kegiatan.

Tabel 2.1.2.

Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA		Target	Realisasi Target	% Capaian Target (Realisasi Fisik)	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	6 dok	100
	2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	100
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang	32 orang	100
	4.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100
	5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	100
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	6.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 orang	2 orang	100
	7.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 orang	3 orang	100
	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	8.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	0 orang	0 orang	-

9.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0 orang	-
10.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0 orang	-
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
11.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100
12.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	100
13.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	1 paket	100
14.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	100
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 kali	12 kali	100
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
16.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	100
17.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 unit	0 unit	-
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
18.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100
19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 orang	2 orang	100
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	23 unit 4 orang	23 unit 4 orang	100
21.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34 unit	32 unit	94,12
II Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
i. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				
22.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	3 dok	3 dok	100
23.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	1 dok	1 dok	100
24.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	1 dok	1 dok	100
25.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1 dok	1 dok	100
26.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	3 dok	3 dok	100

		Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota			
	j. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
	27.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 dok	1 dok	100
III	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
	k. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
	28.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	95%	95
	29.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 kali	0 kali	80
			1 kali	1 kali	
			3 kali	1 kali	
			1 buku	0 buku	
			1 buku	1 buku	
	30.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 dok	2 dok	100
	31.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dok	1 dok	100
			1 dok	1 dok	
			1 dok	1 dok	
			1 dok	1 dok	
			1 aplikasi	1 aplikasi	
	32.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 kali	1 kali	100
			1 dok	1 dok	
			100%	100%	
			4 kali	4 kali	
			4 kali	4 kali	
	l. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
	33.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 kali	3 kali	100
	34.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40 Daerah Irigasi (DI) 3 kali	40 Daerah Irigasi (DI)	100

			10 kali	3 kali	
				10 kali	
m. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					
	35.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 kali	4 kali	100
	36.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10 lokasi	10 lokasi	100
	37.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 kali	6 kali	100
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
IV	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				
	n. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				
	38.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	0 dok	0 dok	-
	39.	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	0 dok	0 dok	-
	o. Pengembangan Inovasi dan Teknologi				
	40.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 aplikasi	1 aplikasi	100

Pada tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 3 program teknis dan 1 program rutin dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019). Program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut mendukung pencapaian 6 sasaran dengan 8 indikator sesuai Renstra Bappeda Tahun 2021-2026. Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Bappeda Tahun 2021 tertuang pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3.
Penilaian Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio Capaian (%)	Predikat
1	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	72%	75,36%	104,67%	Sangat Baik
2	Persentase capaian IKU daerah	88,14%	95,98%	95,98%	Baik
3	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada Penilaian SAKIP	75,53%	76,97%	101,91%	Sangat Baik
4	Persentase implementasi kelitbangan	80%	-	-	-
5	Kategori capaian <i>Innovation Government Award</i> (IGA)	Sangat Inovatif	Inovatif	66,67%	Sedang
6	Nilai SAKIP BAPPEDA	B	AA	100%	Sangat Baik
7	Level Maturitas SPIP BAPPEDA	3	3	100%	Sangat Baik
8	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan BAPPEDA	50%	50%	100%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, tingkat capaian realisasi kinerja Bappeda untuk tahun 2021 dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama kategori capaian kinerja *Sangat Baik*, dapat dilihat untuk capaian kinerja penyelarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada Penilaian SAKIP, Nilai SAKIP Bappeda, Level Maturitas SPIP Bappeda, Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappeda. Indikator ini melebihi target karena didukung oleh tingginya komitmen pimpinan, dan baiknya pemahaman para pejabat penyusun dokumen perencanaan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga perbaikan kualitas dokumen perencanaan dapat diwujudkan. Kedua, kategori realisasi capaian kinerja berpredikat *Baik*, dapat dilihat pada indikator capaian IKU daerah. Meskipun capaian realisasi indikator ini melebihi target, namun kategori realisasi *Baik*. Capaian indikator ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih harus memfokuskan pelaksanaan serta penganggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Selanjutnya, capaian sasaran Bappeda berkategori *Sedang*, dapat dilihat pada indikator capaian IGA. Indikator ini masih berpredikat *Sedang* karena banyak inovasi yang tidak sesuai petunjuk teknis, dan belum memenuhi semua indikator penilaian IGA. Ditambah lagi, adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 untuk indikator *implementasi kelitbangan*.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Bappeda Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, statistik, dan penelitian meliputi:

- a. membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta penyusunan program pembangunan daerah;
- b. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan penunjang perencanaan pembangunan, statistik, dan penelitian;
- c. melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bappeda dilaksanakan dan diukur dalam pernyataan indikator sasaran Kepala Bappeda yang dituangkan dalam Renstra Bappeda tahun 2021-2026. Jenis indikator yang dikaji sesuai tugas dan fungsi pokok Bappeda adalah sebagai berikut:

1. persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
2. persentase capaian IKU Daerah;
3. persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP;
4. persentase implementasi kelitbangan;
5. kategori capaian *Innovation Government Award* (IGA);
6. nilai SAKIP Bappeda;
7. level maturitas SPIP Bappeda;
8. persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappeda.

Pengukuran pencapaian target kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat hingga tahun 2021 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2021 diuraikan pada Tabel 2.2.2 (T-C.30).

Tabel 2.2.2. (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kab. Pasaman Barat

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BAPPEDA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah			72%	80%	85%	90%	75,36%		80%	85%	Tingginya komitmen pimpinan
2	Persentase capaian IKU daerah			88,14%	100%	100%	100%	95,98%		100%	100%	Tingginya komitmen pimpinan
3	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada Penilaian SAKIP			75,53%	80%	85%	90%	76,97%		80%	85%	Tingginya komitmen pimpinan
4	Persentase implementasi kelitbangan			80%	85%	90%	95%	-		85%	90%	
5	Kategori capaian <i>Innovation Goverment Award (IGA)</i>			Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif		Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Inovasi tidak sesuai Juknis
6	Nilai SAKIP BAPPEDA			B	B	B	B	AA		B	B	Tingginya komitmen

												pimpinan
7	Level Maturitas SPIP BAPPEDA			3	3	3	3	3		3	3	Tingginya komitmen pimpinan
8	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan BAPPEDA			50%	50%	75%	75%	50%		50%	75%	Tingginya komitmen pimpinan

Seperti yang dijelaskan di atas, Bappeda Kabupaten Pasaman Barat berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Meski demikian, Bappeda Kabupaten Pasaman Barat masih harus berupaya dalam mencapai target hingga target tahun 2026. Berdasarkan tabel T-C.30 di atas, delapan indikator tersebut mengalami peningkatan target capaian di tahun 2023. Peningkatan target capaian sejalan dengan terus meningkatnya anggaran, meningkatnya pemahaman SDM melalui bimbingan teknis yang diikuti, adanya ketegasan pimpinan untuk mengejar target capaian, dan orientasi untuk mencapai target agar lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun, dalam penerapannya masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut, seperti adanya tumpang tindih prioritas program/kegiatan dan adanya perubahan regulasi dari pusat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) dibutuhkan upaya seluruh pihak baik Bappeda, Daerah dan para *stakeholder* untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang konsisten, tepat waktu, dan sesuai dengan penataan ruang melalui ketaatan terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
- 2) dibutuhkan upaya seluruh pihak baik Bappeda, Daerah dan para *stakeholder* untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan (sesuai aturan yang berlaku, selaras dan sinkron antar dokumen perencanaan lainnya)
- 3) dibutuhkan upaya seluruh pihak baik Bappeda, Daerah dan para *stakeholder* untuk Optimalisasi penyediaan data pendukung perencanaan pembangunan yang memadai melalui penyediaan dokumen statistik dan penelitian yang berkualitas.
- 4) dibutuhkan upaya seluruh pihak baik Bappeda, Daerah dan para *stakeholder* untuk penguatan Dewan Riset Daerah dengan memberikan fasilitasi dan penyediaan sarana sosialisasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah melalui inovasi.
- 5) dibutuhkan upaya seluruh pihak baik Bappeda, Daerah dan para *stakeholder* untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM perencanaan daerah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- 6) dibutuhkan upaya seluruh pihak baik Bappeda, Daerah dan para *stakeholder* untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang daerah melalui penerapan teknologi informasi yang tepat.

BAPPEDA berperan sebagai koordinator dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Keterbatasan SDM dan APBD serta mekanisme perencanaan yang belum sesuai dengan regulasi yang berlaku dapat berimplikasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, seperti:

1. masih ditemukan kegiatan yang muncul di Renja OPD namun tidak terdapat dalam kegiatan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan daerah (RPJMD). Akibatnya, beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan pengalokasian anggaran karena dinilai tidak berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan/atau tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.
2. masih ditemukan kegiatan yang tidak melalui tahapan perencanaan yang semestinya (tidak melalui Musrenbang di tingkat Nagari, Kecamatan, maupun Kabupaten).
3. masih rendahnya hasil Musrenbang RKPD yang dapat diakomodir (kurang dari 30%) akibat berbagai kendala seperti, tidak terpenuhinya persyaratan teknis, tidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan

daerah, hingga komitmen OPD yang masih rendah untuk mengakomodir usulan masyarakat tersebut.

4. adanya usulan/kebutuhan masyarakat yang tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan karena keterbatasan APBD.
5. belum tercapainya sejumlah target kinerja RPJMD karena program/kegiatan yang terdapat di dokumen rencana pembangunan tidak diakomodir dalam Renstra dan Renja OPD.

2.4 Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAPPEDA Kab. Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar **Rp 6.151.421.530,00** (*enam milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah*) untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2023. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dari 4 program (teknis dan rutin), 16 Kegiatan dan 44 sub kegiatan yang direncanakan. Adapun telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat disajikan pada Tabel 2.4. (T-C.31) berikut:

Tabel 2.4. (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir)				Catatan Penting (Penjelasan)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kab. Pasaman Barat	Persentase pelayanan penunjang Pemerintah Daerah	100%	4.574.321.940	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pelayanan penunjang Pemerintah Daerah	100%	4.584.321.940	
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja (pelaporan) program dan kegiatan BAPPEDA	8 dok	35.116.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja (pelaporan) program dan kegiatan BAPPEDA	8 dok	35.116.200	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen perencanaan BAPPEDA yang disusun	6 dok	18.228.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan BAPPEDA yang disusun	6 dok	18.228.000	
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen evaluasi kinerja (pelaporan) BAPPEDA yang disusun	2 dok	16.888.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja (pelaporan) BAPPEDA yang disusun	2 dok	16.888.200	
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai BAPPEDA	100%	3.706.954.535	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai BAPPEDA	100%	3.706.954.535	

3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	33 orang	3.500.849.535	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	33 orang	3.500.849.535	
4.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	12 bulan	139.655.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	12 bulan	139.655.000	
5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Frekuensi penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 bulan	66.450.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 bulan	66.450.000	
3)	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola BAPPEDA	589 unit	57.592.500	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola BAPPEDA	589 unit	57.592.500	
6.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada BAPPEDA	2 orang	30.870.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada BAPPEDA	2 orang	30.870.000	
7.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah PNS dan THL Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 orang	26.722.500	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah PNS dan THL Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 orang	26.722.500	
4)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah peserta Diklat / Bimtek	61 orang	162.636.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peserta Diklat / Bimtek	61 orang	162.636.500	

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

8.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah PNS Penerima Pakaian Dinas	33 orang	49.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah PNS Penerima Pakaian Dinas	33 orang	49.500.000	
9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)	3 orang	31.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)	3 orang	31.500.000	
10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	30 orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan-Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	55 orang	50.000.000	
11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	4 orang	31.636.500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	3 orang	31.636.500	
5)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	100%	264.073.830	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	100%	264.073.830	
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	1 Paket	4.002.075	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	1 Paket	4.002.075	
13.	Penyediaan Peralatan dan	BAPPEDA Kab.	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket	30.000.000	

	Perlengkapan Kantor	Pasaman Barat				dan Perlengkapan Kantor				
14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 Paket	7.379.655	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 Paket	7.379.655	
15.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Bappeda yang dibutuhkan	1 Paket	22.692.100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Bappeda yang dibutuhkan	1 Paket	22.692.100	
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti dan penyediaan makan /minum rapat koordinasi internal BAPPEDA	12 kali	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti dan penyediaan makan /minum rapat koordinasi internal BAPPEDA	12 kali	200.000.000	
6)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan / perlengkapan kantor	2 unit	25.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan / perlengkapan kantor	2 unit	25.000.000	
17.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	1 unit	18.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	1 unit	18.000.000	
18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah pengadaan peralatan elektronik	1 unit	7.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan elektronik	1 unit	7.000.000	

			penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran				penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran			
19.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang dibangun/rehab	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang dibangun/rehab	-	-	
7)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	135.550.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	135.550.000	
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 bulan	107.100.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 bulan	107.100.000	
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	1. Frekuensi penyediaan Jasa pembersihan landscape kantor 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	12 kali 2 orang	28.450.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah penyediaan Jasa pembersihan landscape kantor 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	12 kali 2 orang	28.450.000	
8)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	57 Unit	187.398.375	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	61 Unit	205.138.000	

22.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	23 Unit 3 Orang	147.673.375	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	23 Unit 3 Orang	150.413.000	Penyesuaian terhadap alokasi Pagu Bappeda
23.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	34 Unit	39.725.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	34 Unit	39.725.000	
24.	Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	BAPPEDA Kab. Pasaman Barat	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	Penyesuaian terhadap alokasi Pagu Bappeda
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Pasaman Barat	Persentase kualitas perencanaan bernilai baik	100%	400.000.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kualitas perencanaan bernilai baik	100%	400.000.000	
9)	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kab.	9 dok	320.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kab.	9 dok	315.000.000	

			Pasaman Barat				Pasaman Barat			
25.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen usulan kegiatan yang didanai melalui DAK, APBN, APBD Provinsi	3 dok	50.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen usulan kegiatan yang didanai melalui DAK, APBN, APBD Provinsi	3 dok	50.000.000	
26.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil forum Perangkat Daerah	1 dok	5.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen hasil forum Perangkat Daerah	1 dok	5.000.000	
27.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kabupaten	1 dok	37.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kabupaten	1 dok	37.000.000	
28.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kecamatan	1 dok	25.000.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kecamatan	1 dok	20.000.000	
29.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen RPJMD Tahun 2022-2026 dan RKPD Tahun 2022 beserta perubahan	3 dok	203.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPJMD Tahun 2022-2026 dan RKPD Tahun 2022 beserta perubahan	2 dok	203.000.000	Karena pada tahap penyusunan dokumen RPJMD tidak diperlukan lagi penyusunan dokumen rencana teknokratik RPJMD periode selanjutnya
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	Kab. Pasaman Barat	Persentase data dan informasi yang dimanfaatkan	100%	50.000.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	Persentase data dan informasi yang dimanfaatkan	100%	50.000.000	

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

	Perencanaan Pembangunan Daerah					Perencanaan Pembangunan Daerah				
30.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah data perencanaan pembangunan daerah yang dianalisis untuk dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan daerah	35 Data	20.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data perencanaan pembangunan daerah yang dianalisis untuk dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan daerah	35 Data	20.000.000	
31.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah profil pembanguna daerah yang disusun	1 Profil	30.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah profil pembanguna daerah yang disusun	1 Profil	30.000.000	
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	3 dok	30.000.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	3 dok	35.000.000	
32.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2022, DAK Tahun 2022, dan Monev Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	3 dok	30.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2022, DAK Tahun 2022, dan Monev Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	3 dok	35.000.000	
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Pasaman Barat	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85%	700.000.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	100%	490.000.000	Menyesuaikan Pagu Bappeda

12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Pasaman Barat	Persentase kesesuaian program pembangunan bidang sosial dan budaya dengan dokumen perencanaan	100%	350.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian program pembangunan bidang sosial dan budaya dengan dokumen perencanaan	100%	310.000.000	
33.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Pasaman Barat	Dokumen evaluasi pencapaian SDGs (semester dan Tahunan)	2 dok	50.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen evaluasi pencapaian SDGs (semester dan Tahunan)	2 dok	60.000.000	Penyesuaian terhadap alokasi Pagu Bappeda
34.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Pasaman Barat	Persentase OPD lingkup bidang sosial dan budaya yang menyusun perencanaan dengan baik	100%	75.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase OPD lingkup bidang sosial dan budaya yang menyusun perencanaan dengan baik	100%	80.000.000	Penyesuaian terhadap alokasi Pagu Bappeda
35.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Pasaman Barat	1. Evaluasi Daerah Tertinggal 2. Evaluasi Monev SLRT yang difasilitasi 3. Jumlah Dokumen LP2KD yang disusun 4. Rakor TKPKD 5. Renaksi PKD	1. 1 dok 2. 2 kali 3. 1 dok 4. 3 kali 5. 1 dok	75.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1. Evaluasi Daerah Tertinggal 2. Evaluasi Monev SLRT yang difasilitasi 3. Jumlah Dokumen LP2KD yang disusun 4. Rakor TKPKD 5. Renaksi PKD	1. 1 dok 2. 2 kali 3. 1 dok 4. 3 kali 5. 1 dok	50.000.000	
36.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Kab. Pasaman Barat	1. Capaian Indikator PUG (hijau)nuntu	1. 100% 2. 1 dok 3. 4 kali	50.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	1. Capaian Indikator PUG (hijau)nuntu	1. 100%	50.000.000	

	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		k seluruh kategori 2. Dokumen RANDA PUG 3. Pelaporan RANDA PUG CP 03,05, 09, 12 tepat waktu			Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	k seluruh kategori 2. Dokumen RANDA PUG 3. Pelaporan RANDA PUG CP 03,05, 09, 12 tepat waktu	2 4 kali		
37.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Pasaman Barat	1. FGD dan fasilitasi Aksi Konvergensi Nagari 2. Terlaksananya 8 Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting tepat waktu	1. 19 Nagari 2. 8 Aksi dilakukan tepat waktu	100.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1. FGD dan fasilitasi Aksi Konvergensi Nagari 2. Terlaksananya 8 Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting tepat waktu	85%	120.000.000	Penyesuaian terhadap alokasi Pagu Bappeda
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Pasaman Barat	Persentase kesesuaian program pembangunan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah dengan dokumen perencanaan daerah	100%	60.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian program pembangunan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah dengan dokumen perencanaan daerah	100%	40.000.000	
38.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Pasaman Barat	1. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan 2. Jumlah regulasi dan laporan yang diterbitkan	1. 4 kali 2. 1 SK Satgas 3. 1 Laporan Satgas	40.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Jumlah rapat koordinasi 2. Jumlah regulasi dan laporan yang diterbitkan	1. 4 kali 2. 1 SK	40.000.000	
39.	Koordinasi Penyusunan	Kab. Pasaman	1. Jumlah rapat koordinasi	1. 1 kali 2. 1 kali	20.000.000	Koordinasi Penyusunan	3. Jumlah rapat koordinasi		0	Sub kegiatan ini

	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barat	yang dilaksanakan (workshop dan Internalisasi PPSI, rapat komir) 2. Jumlah pelaksanaan rapat monitoring			Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	yang dilaksanakan (workshop dan Internalisasi PPSI, rapat komir) 1. Jumlah pelaksanaan rapat monitoring			mengakomodir program IPDMIP yang telah berakhir jangka waktu pelaksanaannya pada Juni 2022
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Pasaman Barat	Persentase kesesuaian perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan	100%	290.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan	100%	140.000.000	
40.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Pasaman Barat	1. Jumlah laporan inventarisasi usulan pembangunan 2. Jumlah rapat koordinasi, sosialisasi, sinkronisasi yang dilaksanakan	1. 1 Laporan 2. 4 kali	60.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Jumlah laporan inventarisasi usulan pembangunan 2. Jumlah rapat koordinasi, sosialisasi, sinkronisasi yang dilaksanakan	1. 1 Laporan 2. 4 kali	60.000.000	
41.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab. Pasaman Barat	1. Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur 2. Jumlah rapat koordinasi	1. 1 dok 2. 2 kali 3. 1 SK	40.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	1. Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur 2. Jumlah rapat koordinasi	1. 1 dok 2. 2 kali 3. 1 SK	40.000.000	Penyesuaian terhadap alokasi Pagu Bappeda

	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		yang dilaksanakan 3. Jumlah SK Penetapan Lokasi			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	yang dilaksanakan 3. Jumlah SK Penetapan Lokasi			
42.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Pasaman Barat	1. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan 2. Jumlah SK Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. 2 kali 2. 1 SK	40.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan 2. Jumlah SK Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. 2 kali 2. 1 SK	40.000.000	
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Pasaman Barat	Persentase ketersediaan data statistik dan kajian pembangunan daerah	100%	447.099.590	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase ketersediaan data statistik dan kajian pembangunan daerah	100%	447.099.590 230.000.000	
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Pereaturan	Kab. Pasaman Barat	Persentase ketersediaan data dan kajian kelitbangan	100%	297.099.590	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Pereaturan	Persentase ketersediaan data dan kajian kelitbangan	100%	297.099.590	
43.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK)	1 dok	217.099.590	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 dok	217.099.590	
44.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah rapat koordinasi kelitbangan dan peraturan	12 kali	80.000.000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah rapat koordinasi kelitbangan dan peraturan yang diikuti	12 kali	80.000.000	

			yang diikuti							
16	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Pasaman Barat	Jumlah inovasi OPD yang didaftarkan pada ajang IGA	48 Inovasi	150.000.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah yang didaftarkan dalam ajang <i>Innovation Goverment Award (IGA) Tahun 2022</i>	48 Inovasi	150.000.000	
45.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kab. Pasaman Barat	Jumlah inovasi OPD	52 Inovasi	150.000.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah inovasi OPD	52 Inovasi	150.000.000	
	Jumlah				6.151.421.530				5.972.164.750	

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka BAPPEDA Pasaman Barat tidak memiliki usulan program dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam nawacita pemerintah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024, yakni sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tranformasi pelayanan publik.

Sementara itu, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 menyebutkan bahwa prioritas RPJMD pada kurun waktu 2021-2026 adalah pembangunan yang mendukung 7 misi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan 5 program unggulan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Adapun program unggulan Provinsi Sumatera Barat pada kurun waktu 2021-2026, diantaranya:

1. Sumbar Religius dan Berbudaya;
2. Sumbar Sehat dan Cerdas;
3. Sumbar Sejahtera;
4. Sumbar Berkeadilan;
5. Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik (*e-Government*).

Secara lebih rinci, arah kebijakan nasional dan provinsi tahun 2023 tertuang pada tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Pasaman Barat**

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2023	Prioritas Pembangunan RKPDP Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Prioritas Pembangunan RKPDP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023
I	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	1. Mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas
		2. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	2. Pengentasan kemiskinan
		3. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	3. Perluasan peluang pekerjaan 4. Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal
II	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	5. Perluasan peluang pekerjaan 6. Mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas
III	Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	5. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	7. Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat 8. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
IV	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	9. Masyarakat Yang Agamais dan berbudaya 10. Masyarakat yang rukun dan berkeadilan
V	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan	7. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	11. Pengentasan kemiskinan 12. Perluasan Kesempatan Kerja 13. Penguatan industri berbasis komoditas

	pelayanan dasar		unggulan lokal
VI	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	8. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	14. Masyarakat Yang Tangguh Menghadapi Bencana
VII	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	15. Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel 16. Mewujudkan Birokrasi yang efisien dan efektif 17. Mewujudkan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Sesuai arah kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana diuraikan pada tabel 3.1, Bappeda Kabupaten Pasaman Barat merupakan badan yang menunjang tugas bupati di bidang perencanaan pembangunan, dan penelitian dan pengembangan, yang secara lebih rinci memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pengendalian, penelitian dan pengembangan khususnya untuk mendorong terciptanya inovasi daerah sebagai resolusi atas permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, Bappeda Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian prioritas VII nasional, dan mendukung prioritas provinsi yaitu *meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas*. Untuk tingkat Kabupaten Bappeda mendukung prioritas daerah *mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas*. Hal ini selaras dengan tujuan dan sasaran Bappeda, yang tercantum dalam dokumen Renstra Bappeda 2021-2026 yaitu mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, dengan indikator utama persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA

Misi Kepala daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026, yaitu *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif* menjadi acuan Bappeda dalam menyusun RENJA Bappeda Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023, dimana Bappeda berperan sebagai Perangkat Daerah yang menunjang urusan Pemerintah Daerah. Misi tersebut diwujudkan melalui tujuan Bappeda tahun 2023 yaitu mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, mengimplementasikan hasil kelitbangan dan inovasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Selain penyusunan tujuan, Bappeda menetapkan sasaran untuk mewujudkan tujuan pertama, yaitu optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan, meningkatnya kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan, meningkatnya kinerja dan pelayanan Bappeda yang kompeten dan akuntabel. Sementara untuk mewujudkan tujuan kedua, sasaran Bappeda yang ingin dicapai yaitu meningkatnya peran kelitbangan dalam perencanaan pembangunan dan meningkatnya kualitas inovasi daerah.

BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun indikator yang ingin dicapai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda yang telah

diselaraskan dengan RPJMD, Renstra dan arah kebijakan nasional serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja BAPPEDA Tahun 2023

No	Misi	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Tujuan Bappeda	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang professional dan inovatif	Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan	1.	Optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan	Persentase tingkat keselarasan dokumen jangka menengah daerah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
						2.	Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	Persentase capaian IKU daerah
						3.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan BAPPEDA yang kompeten dan	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada

							akuntabel	Penilaian SAKIP
				2. Mengimplementasikan hasil kelitbangan dan inovasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	4.	Meningkatnya peran kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase implementasi kelitbangan
						5.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Kategori capaian <i>Innovation Government Award (IGA)</i>

3.3. Rencana Program dan Kegiatan

Program pembangunan daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Pasaman Barat periode 2021-2026 merumuskan strategi untuk pencapaian visi misi kepala daerah, yaitu penyederhanaan birokrasi pemerintahan, pengelolaan sistem perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien, penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik dan penguatan pengelolaan kearsipan di instansi pemerintah pada semua tingkatan, mendorong inovasi dalam pelayanan publik. Program di atas menjadi acuan dalam pelaksanaan program kegiatan di Bappeda Kabupaten Pasaman Barat dan dituangkan dalam dokumen Renja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023. Program yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai penunjang urusan pemerintah dibidang perencanaan pembangunan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Penelitian dan Pengembangan. Ketiga program ini dirumuskan sesuai dengan indikator kinerja Bappeda dalam Renstra Bappeda periode 2021-2026 yaitu tingkat konsistensi perencanaan pembangunan, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, nilai SAKIP Bappeda, Level Maturitas SPIP Bappeda, dan persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Bappeda.

Untuk tahun anggaran 2023, alokasi Bappeda adalah sebesar Rp 5.706.321.940,00 (**lima milyar tujuh ratus enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh**). Alokasi yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) diuraikan ke dalam program teknis dan program rutin Bappeda. Tahun 2023, Bappeda melaksanakan 4 program yang diuraikan ke dalam 16 kegiatan. Kegiatan-kegiatan teknis dan rutin Bappeda tersebut diuraikan kembali menjadi 45 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ada 8 kegiatan dan 21 sub kegiatan.
2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, ada 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ada 3 kegiatan, dan 10 sub kegiatan.
4. Program Penelitian dan Pengembangan ada 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

Tabel 3.3. (T-C.33)
Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Isian Sub Kegi	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	1									5.704.321.940					5.525.065.160	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4.635.065.160	
5	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										23.386.500	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen perencanaan BAPPEDA yang disusun	Nilai SAKIP BAPPEDA	100 %	7 Dokumen	1 8	18.228.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	13.819.000
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja (pelaporan) BAPPEDA yang disusun	Nilai SAKIP BAPPEDA	100 %	2 Dokumen	1 8	16.888.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	9.567.500
5	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3.720.273.295	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan BAPPEDA	100 %	33 Orang	75 %	3.500.849.535	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.514.168.295
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Frekuensi penyediaan honorarium petugas pengelola administrasi	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan BAPPEDA	100 %	12 Bulan	75 %	139.655.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	139.655.000
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Frekuensi penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan BAPPEDA	100 %	12 Bulan	75 %	66.450.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	66.450.000
5	1	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										54.850.000	
5	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada BAPPEDA	Level Maturitas SPIP BAPPEDA	100 %	2 Orang	3 Level	30.870.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	29.400.000
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah PNS dan Non PNS (THL) petugas penatausahaan BMD	Level Maturitas SPIP BAPPEDA	100 %	2 Orang	3 Level	26.722.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	25.450.000
5	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										204.630.000	
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah PNS penerima pakalan dinas	Level Maturitas SPIP BAPPEDA	100 %	33 Orang	3 Level	49.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	49.500.000

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Jaran Sub Kegi	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	3 Orang	3 Level	31.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	30.000.000
5	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	55 Orang	3 Level	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	95.000.000
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	4 Orang	3 Level	31.636.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	30.130.000
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								264.073.830				261.237.365	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan Instalasi listrik penunjang operasional kantor	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	1 Paket	3 Level	4.002.075	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.911.500
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ATK yang dibutuhkan	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	1 Paket	3 Level	30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	29.072.000
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	1 Paket	3 Level	7.379.655	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	9.026.785
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Blanko SPT, SPDP, kwitansi, dan map BAPPEDA yang dibutuhkan	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	1 Paket	3 Level	22.692.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	18.227.000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	12 Kali	3 Level	200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	200.000.000
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								25.000.000				30.000.000	
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	1 Unit	3 Level	18.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	20000000
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	1 Unit	3 Level	7.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10000000

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Jaran Sub Kegi	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang	Usuran Pemerintahan Daerah				135.550.000					135.550.000			
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	12 Bulan	3 Level	107.100.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	107.100.000
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Frekuensi penyediaan jasa pembersihan landscape kantor Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	12 Kali 2 Orang	3 Level	28.450.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	28.450.000
5	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Usuran Pemerintahan Daerah				197.398.375					205.138.000			
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (PTT dan THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	23 Unit 3 Orang	3 Level	147.673.375	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	150.413.000
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	34 Unit	3 Level	39.725.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	39.725.000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	1 Unit	3 Level	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	15.000.000
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								400.000.000			400.000.000		
5	1	2	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								320.000.000			315.000.000		
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen	Jumlah dokumen usulan kegiatan yang didanai melalui DAK, APBN, APBD Provinsi	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP		97 %	3 Dokumen	85 %	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian dokumen	97 %	50.000.000
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen	Jumlah dokumen hasil Forum Perangkat Daerah	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP		97 %	1 Dokumen	85 %	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian dokumen	97 %	5.000.000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian dokumen	Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kabupaten	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP		97 %	1 Dokumen	85 %	37.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian dokumen	97 %	37.000.000
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase kesesuaian dokumen	Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kecamatan	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP		97 %	1 Dokumen	85 %	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian dokumen	97 %	20.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	aran Sub Kegi	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian dokumen	Jumlah dokumen RPJMD dan RKPD beserta perubahannya	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP		97 %	3 Dokumen	85 %	203.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian dokumen	97 %	203.000.000
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								50.000.000				50.000.000	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen	Jumlah data perencanaan pemb	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP		97 %	35 Data	85 %	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian dokumen	97 %	20.000.000
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian dokumen	Jumlah profil pembangunan daerah yang disusun	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP		97 %	1 Profil	85 %	30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian dokumen	97 %	30.000.000
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								30.000.000				35.000.000	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2022, DAK Tahun 2022, dan Monev Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Persentase capaian IKU daerah		97 %	3 Dokumen	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian dokumen	97 %	35.000.000
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								720.000.000				490.000.000	
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								350.000.000				310.000.000	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah dokumen evaluasi pencapaian SDGs (semester dan tahunan)	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		85 %	2 Dokumen	85 %	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85 %	60000000
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Persentase OPD lingkup sosial budaya yang menyusun perencanaan dengan baik	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		85 %	100 %	85 %	75.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85 %	0
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Evaluasi Daerah Tertinggal Evaluasi Monev SLRT yang difasilitasi Jumlah dokumen LP2KD yang disusun Rakor TKPKD Renaksi PKD	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		85 %	1 Dokumen 2 Kali 1 Dokumen 3 Kali 1 Dokumen	85 %	75.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85 %	80.000.000
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Capaian indikator PUG (hijau) untuk seluruh kategori Dokumen RANDA PUG Pelaporan RANDA PUG CP 03, 05, 09, 12 tepat waktu	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		85 %	100 % 1 Dokumen 4 Kali	85 %	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85 %	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Jaran Sub Kegi	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	FGD dan fasilitasi Aksi Konvergensi Nagari Terlaksananya 8 Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting tepat waktu	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		85 %	38 Kali 8 Aksi	85 %	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85 %	120.000.000
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								80.000.000				40.000.000	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Jumlah regulasi dan laporan yang diterbitkan	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		85 %	4 Kali 1 SK	85 %	40.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85 %	40000000
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah pelaksanaan rapat monitoring Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (workshop dan internalisasi PPSI, rapat Komir)	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		85 %	1 Kali 3 Kali	85 %	40.000.000	Dana Transfe r m Umum- Dana Alokasi Umu Pendapatan Hibah dari Badan/Lemb Organisasi L Negeri		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85 %	0
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								290.000.000				140.000.000	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah laporan inventarisasi usulan pembangunan Jumlah rapat koordinasi, sosialisasi, sinkronisasi yang dilaksanakan	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		85 %	1 Laporan 4 Kali	85 %	60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85 %	60.000.000
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Jumlah SK Penetapan Lokasi	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		85 %	1 Dokumen 2 Kali 1 SK	85 %	190.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85 %	40.000.000
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Jumlah SK Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		85 %	2 Kali 1 SK	85 %	40.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85 %	40.000.000
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								447.099.590				447.099.590	
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								447.099.590				447.099.590	
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								297.099.590				297.099.590	
5	05	02	2.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase hasil kelitangan yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK)	Persentase implementasi kelitbangan		80	1 Dokumen	100 %	217.099.590	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelitangan yang ditindaklanjuti	80	217099590
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase hasil kelitangan yang ditindaklanjuti	Jumlah rapat koordinasi kelitbangan dan peraturan yang diikuti	Persentase implementasi kelitbangan		80	12 Kali	100 %	80.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelitangan yang ditindaklanjuti	80	80.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	aran Sub Kegi	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi							150.000.000			150.000.000			
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Jumlah inovasi OPD	Kategori capaian Innovation Government Award (IGA)	80	52 Inovasi	1 Sangat Inovatif	150.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	80	150.000.000		
TOTAL												6.151.421.530			5.972.164.750			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana kerja dan pendanaan untuk kegiatan tahun 2023 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, yakni mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat sasaran, diukur melalui persentase pencapaian target kinerja RPJMD. Bappeda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, rumusan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Bappeda. Capaian IKU tersebut menjadi deskripsi realisasi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat sebagaimana telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, IKU Kepala Bappeda disusun berdasarkan penelaahan terhadap hasil evaluasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut juga memperhatikan tren ataupun isu baik secara global, nasional ataupun lokal. Bappeda untuk tahun 2023 direncanakan akan melaksanakan 4 program (teknis dan rutin), 15 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan total pagu Rp **6.151.421.530,- (Enam Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah)**. Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada umumnya dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat. Berikut rumusan program dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 disajikan pada table 4.1 (T-C.33).

Bappeda Kabupaten Pasaman Barat

Kode	Tujuan/Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Kodeifikasi					
		Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja						
						Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur		Tujuan/Sasara n/Program/Ke giatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	1				PERENCANAAN								5.704.321.940			5.525.065.160		
					TUJUAN : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah												
					SASARAN : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda		8			35.116.200	Dana Transfer			BB	23.386.500		
						Level Maturitas SPIP Bappeda		3			842.251.205	Umum-Dana Alokasi Umum			3	891.405.365		
						Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan Bappeda		75%			3.706.954.535				75%	3.720.273.295		
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.584.321.940			4.635.065.160		
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								35.116.200			23.386.500		
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen perencanaan BAPPEDA yang disusun	Nilai SAKIP BAPPEDA		100 %	7 Dokumen	1 B	18.228.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	13.819.000
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja (pelaporan) BAPPEDA yang disusun	Nilai SAKIP BAPPEDA		100 %	2 Dokumen	1 B	16.888.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	9.567.500
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.706.954.535			3.720.273.295		
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan BAPPEDA		100 %	33 Orang	75 %	3.500.849.535	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.514.168.295
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Frekuensi penyediaan honorarium petugas pengelola administrasi	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan BAPPEDA		100 %	12 Bulan	75 %	139.655.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	139.655.000
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Frekuensi penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan BAPPEDA		100 %	12 Bulan	75 %	66.450.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	66.450.000
5	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								57.592.500			54.850.000		
5	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada BAPPEDA	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	2 Orang	3 Level	30.870.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	29.400.000

Kode	Tujuan/Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Kode/klasifikasi	
		Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			
						Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tujuan/Sasara n/Program/Ke giatan		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah PNS dan Non PNS (THL) petugas penatausahaan BMD	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	2 Orang	3 Level	26.722.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	25.450.000	
5 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								162.696.500				204.630.000		
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah PNS penerima pakaian dinas	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	33 Orang	3 Level	49.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	49.500.000	
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	3 Orang	3 Level	31.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	30.000.000	
5 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	55 Orang	3 Level	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	95.000.000	
5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	4 Orang	3 Level	31.636.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	30.130.000	
5 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								264.073.830				261.237.365		
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	1 Paket	3 Level	4.002.075	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.911.500	
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ATK yang dibutuhkan	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	1 Paket	3 Level	30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	29.072.080	
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	1 Paket	3 Level	7.379.655	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	9.026.785	
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Blanko SPT, SPPD, kwitansi, dan map BAPPEDA yang dibutuhkan	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	1 Paket	3 Level	22.692.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	18.227.000	
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	12 Kali	3 Level	200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	200.000.000	
5 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								25.000.000				30.000.000		

Kode	Tujuan/Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Kodeifikasi	
		Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Tujuan/Sasara n/Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tujuan/Sasara n/Program/Ke giatan		
5 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	1 Unit	3 Level	18.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	20000000	
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	1 Unit	3 Level	7.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10000000	
5 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								135.550.000					135.550.000	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	12 Bulan	3 Level	107.100.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	107.100.000	
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Frekuensi penyediaan jasa pembersihan landscape kantor Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	12 Kali 2 Orang	3 Level	28.450.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	28.450.000	
5 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								197.398.375					205.138.000	
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (PTT dan THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	23 Unit 3 Orang	3 Level	147.673.375	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	150.413.000	
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	34 Unit	3 Level	39.725.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	39.725.000	
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Level Maturitas SPIP BAPPEDA		100 %	1 Unit	3 Level	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	15.000.000	
5 1 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								400.000.000					400.000.000	
5 1 2 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								320.000.000					315.000.000	
	Tujuan : Mewujudkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan				85%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				90%	
	Sasaran : 1. Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan dokumen jangka menengah daerah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Peranakat Daerah				85%			720.000.000					90%	490.000.000
	2. Meningkatnya Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase capaian IKU Daerah				100%			30.000.000					100%	35.000.000

Kode	Tujuan/Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Kodeifikasi		
					Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			
									Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur		Tujuan/Sasara n/Program/Ke giatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					3. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappeda yang Kompeten dan Akuntabel	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian Sakip			85%			370.000.000			90%	365.000.000		
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen	Jumlah dokumen usulan kegiatan yang didanai melalui DAK, APBN, APBD Provinsi	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP	97 %	3 Dokumen	85 %	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian doku	97 %	50.000.000	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen	Jumlah dokumen hasil Forum Perangkat Daerah	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP	97 %	1 Dokumen	85 %	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian doku	97 %	5.000.000	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian dokumen	Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kabupaten	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP	97 %	1 Dokumen	85 %	37.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian doku	97 %	37.000.000	
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase kesesuaian dokumen	Jumlah dokumen hasil musrenbang tingkat kecamatan	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP	97 %	1 Dokumen	85 %	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian doku	97 %	20.000.000	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian dokumen	Jumlah dokumen RPJMD dan RKPD beserta perubahannya	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP	97 %	3 Dokumen	85 %	203.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian doku	97 %	203.000.000	
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							50.000.000				50.000.000		
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen	Jumlah data perencanaan pembu	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP	97 %	35 Data	85 %	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian doku	97 %	20.000.000	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian dokumen	Jumlah profil pembangunan daerah yang disusun	Persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP	97 %	1 Profil	85 %	30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian doku	97 %	30.000.000	
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							30.000.000				35.000.000		
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2022, DAK Tahun 2022, dan Monev Renja Perangkat Deerah Tahun 2022	Persentase capaian IKU daerah	97 %	3 Dokumen	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian doku	97 %	35.000.000	
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							720.000.000				490.000.000		
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							350.000.000				310.000.000		

Kode	Tujuan/Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Kodeifikasi	
		Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Keuaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Tujuan/Sasara n/Program/Ke giatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tujuan/Sasara n/Program/Ke giatan			
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah dokumen evaluasi pencapaian SDGs (semester dan tahunan)	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		85 %	2 Dokumen	85 %		50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85 %	60000000	
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Persentase OPD lingkup sosial budaya yang menyusun perencanaan dengan baik	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		85 %	100 %	85 %		75.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85 %	0	
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Evaluasi Daerah Tertinggal Evaluasi Monev SLRT yang difasilitasi Jumlah dokumen LP2KD yang disusun Rakor TKPKD Renaksi PKD	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		85 %	1 Dokumen 2 Kali 1 Dokumen 3 Kali 1 Dokumen	85 %		75.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85 %	80.000.000	
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Capaian indikator PUG (hijau) untuk seluruh kategori Dokumen RANDA PUG Pelaporan RANDA PUG CP 03, 05, 09, 12 tepat waktu	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		85 %	100 % 1 Dokumen 4 Kali	85 %		50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85 %	50.000.000	
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	FGD dan fasilitasi Aksi Konvergensi Nagari Terlaksananya 8 Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting tepat waktu	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		85 %	38 Kali 8 Aksi	85 %		100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85 %	120.000.000	
5 1 3 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)									80.000.000				40.000.000		
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Jumlah regulasi dan laporan yang diterbitkan	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		85 %	4 Kali 1 SK	85 %		40.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85 %	40000000	
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah pelaksanaan rapat monitoring Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (workshop dan internalisasi PPSI, rapat Komir)	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		85 %	1 Kali 3 Kali	85 %		40.000.000	Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umu Pendapatan Hibah dari Badan/Lemb Organisasi L Negeri	r m aga/ uar	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85 %	0	
5 1 3 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan									290.000.000				140.000.000		
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah laporan inventarisasi usulan pembangunan Jumlah rapat koordinasi, sosialisasi, sinkronisasi yang dilaksanakan	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		85 %	1 Laporan 4 Kali	85 %		60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85 %	60.000.000	

Kode	Tujuan/Sasaran/Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Kodeifikasi	
		Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Tujuan/Sasara n/Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tujuan/Sasara n/Program/Ke giatan		
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Jumlah SK Penetapan Lokasi	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		85 %	1 Dokumen 2 Kali 1 SK	85 %	190.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85 %	40.000.000	
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Jumlah SK Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		85 %	2 Kali 1 SK	85 %	40.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	85 %	40.000.000	
5 5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							447.099.590					447.099.590	
5 5 2		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							447.099.590					447.099.590	
	Tujuan : Mengimplementasikan Hasil Kelitbangan dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	Sasaran : 1. Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase implementasi kelitbangan				90%			297.099.590				95%	297.099.590	
	2. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Inovasi Daerah	Kategori capaian Innovation Government Award (IGA)				Sangat Inovatif			150.000.000				Sangat Inovatif	150.000.000	
5 5 2 2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							297.099.590					297.099.590	
5 05 02 2.01 03	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase hasil kelitangan yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK)	Persentase implementasi kelitbangan		80	1 Dokumen	100 %	217.099.590	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelitangan yang ditindaklanjuti	80	217099590	
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase hasil kelitangan yang ditindaklanjuti	Jumlah rapat koordinasi kelitbangan dan peraturan yang diikuti	Persentase implementasi kelitbangan		80	12 Kali	100 %	80.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelitangan yang ditindaklanjuti	80	80.000.000	
5 5 2 2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi							150.000.000					150.000.000	
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Jumlah inovasi OPD	Kategori capaian Innovation Government Award (IGA)		80	52 Inovasi	1 Sangat Inovatif	150.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	80	150.000.000	
TOTAL									6.151.421.530					5.972.164.750	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renja BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Bappeda Tahun 2023 sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan sinergitas antar semua pihak dalam pencapaian tujuan, program dan kegiatan yang telah direncanakan. Penyusunan Renja sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program untuk pembangunan satu tahun kedepan. Selain sebagai kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan OPD pada akhir tahun anggaran. Dengan demikian, harapan terhadap pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi dan sinergis untuk mencapai hasil yang lebih baik dapat diwujudkan.

Simpang Empat, 3 Agustus 2022

Kepala BAPPEDA
Kabupaten Pasaman Barat



Harlina Syahputri, SH, MM
NIP. 19780618 200212 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BAPPEDA PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jl. Soekarno Hatta No. 5, Pasaman Baru - Simpang Empat Pasaman Barat

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 050/62/BAPPEDA/VII/2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Tahunan OPD yang selanjutnya disebut Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 tahun;
- b. bahwa Rencana Kerja OPD disusun sesuai tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis OPD, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan pagu indikatif yang ditetapkan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
- KEDUA** : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan dan penganggaran program dan kegiatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam
Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 3 Agustus 2022

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Harlina Syahputri, SH, MM
NIP. 19780618 200212 2 005